Available Online at
https://journal.umgo.ac.id/index.php/JPPE
Vol. 8 No (1), Tahun 2025
ISSN 2622-349X

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI ONLINE APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

Rusni Djafar[1)]
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pohuwato
rusnidjafar1966@gmail.com

Abstract

The aims of this research to examine the implementation of the online attendance policy for Civil Servants (ASN) at the Regional Secretariat Office of Pohuwato Regency. The research focuses on how the policy is executed, its alignment with organizational goals, and the challenges encountered. The findings reveal that the online attendance policy is strongly aligned with the objectives of improving employee discipline and efficiency as part of bureaucratic reform. Although policy information dissemination has been carried out, comprehension remains limited among field staff and senior employees. Additionally, the enforcement of attendance rules is inconsistent, leading to negative perceptions of fairness. Despite being technically feasible, implementation is hindered by system disruptions, poor network coverage, and insufficient technical skills. Enhancing socialization, ensuring fair rule enforcement, improving technical infrastructure, and establishing specific Standard Operating Procedures (SOPs) are necessary to improve policy effectiveness. Violations of the policy may affect the payment of additional income allowances.

Keywords : *Policy Implementation – Online attendance system– Civil Servants (ASN).*

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Absesni Online Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato, Objek Penelitian dan Waktu Penelitian Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Absesni Online Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato,. Hasil penelitian menunjukan berikut ini : 1) Kebijakan absensi online memiliki relevansi kuat dengan tujuan Sekretariat Daerah Pohuwato, yaitu meningkatkan kedisiplinan dan efisiensi pegawai sebagai bagian dari reformasi birokrasi.2) Penyampaian informasi kebijakan sudah dilakukan, namun belum menjangkau pemahaman secara menyeluruh, terutama pada pegawai lapangan dan generasi senior.3) Sistem absensi memiliki aturan yang jelas, namun belum ditegakkan secara adil dan konsisten, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap keadilan dan netralitas kebijakan.4) Secara teknis kebijakan ini dapat dilaksanakan, tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaan, seperti gangguan sistem, keterbatasan sinyal di lapangan, dan kurangnya kemampuan beberapa pegawai teknis. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini, diperlukan pendalaman sosialisasi, Penegakan aturan yang adil dan merata, Perbaikan sistem teknis dan penyediaan SOP untuk kondisi khusus yang berdampak pada sanksi yang sudah ditentukan dalam peraturan Bupati yang merupakan rujukan terhadap penerapan kebijakan absen online melalui aplikasi SIKAP-ASN. Pelnaggaran terhadap kebijakan ini mengakibatkan pemberian sanksi yang berdampak pada pembayaran tunjang Tambahan Penghasilan pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan – Absensi Online – Aparatur Sipil Negara (ASN)

Received: 05 Juli 2025 *Revised: 06 Juli 2025* *Accepted: 10 Juli 2025*

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu lembaga organisasi atau instansi saat ini hampir tidak dapat dipisahkan dengan kemajuan Teknologi dan informasi yang handal. Terutama di lingkungan organisasi pemerintah dimana Informasi Teknologi sangat menunjang dalam meningkatkan kinerja baik kinerja organisasi maupun kinerja individu aparat. Untuk menjamin dan memperlancar pelaksanaan tugas Aparat pemerintah perlu diatur waktu pelaksanaan tugasnya sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja tersebut. Aparat Sipil

Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lingkungan kerja senantiasa dikendalikan melalui berbagai aturan meupun kebijakan Hal ini sangat memungkinkan untuk dilakukan penertiban atau disiplin kerja aparat melalui mekanisme serta penetapan jam kerja, baik jam masuk maupun jam keluar kantor.

Mekanisme disiplin kerja aparat pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan kebijakan pemerintah Daerah yaitu Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 kemudian telah diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 karena perubahan undang-undang serta memenuhi kebutuhan daerah guna pelakanaan pelayanan pemerintah, mewujudkan disiplin kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Pohuwato. Adapum pengisian daftar hadir dilakukan sebanyak 2 kali yaitu :

1. Masuk kerja :
    a. Pengisian daftar hadir elektronik dan manual dimulai dari pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 08,00; dan
    b. pengisian daftar hadir elektronik dan manual setelah jam 08.00 wita dinyatakan terlambat, dilakukan pengurangan nilai.
2. Pulang kerja ;
    a. Pengisian daftar hadir elektronik dan /atau manual dimulai pukul 16.16 wita untuk hari senin sampai dengan kamis dan pukul 15.01 hari jumat;
    b. Pengisian daftar hadir elektronik dan/atau manual tersedia untuk ditandatangani hingga pukul 17.30 wita; dan
    c. Bagi ASN yang tidak melakukan pengisian daftar hadir elektronik dan/ataumanual saat pulang dilakukan pengurangan nilai.

Displin Pegawai Aparatur sipil Negara sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati nomor 13 Tahun 2019 telah diterapkan melalui mekanisme pengisian daftar hadir baik elektronik maupun manual.

Sikap disiplin yang baik merupakan salah satu bentuk professional Aparat Sipil Negara dalam bekerja karena prilaku disiplin tentu akan menghasilkan pencegahan atau menghindari dari kesalahan , namun disiplin juga memainkan peran penting dalam kehidupan ini untuk menentukan perilaku yang tepat (fith, 2004:1) sehingga menjadi contoh teladan bagi lembaga atau instansi yang berdampak positif pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato.

Daftar hadir tersebut akan diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pohuwato untuk dilakukan perekapan data Aparat Sipil Negara siapa saja yang tidak disiplin masuk kerja atau yang terlambat masuk kerja, namun setelah di evaluasi sistem kehadiran menggunakan absen manual dengan tanda tangan tidak efektif dan banyak masalah contohnya merangkap tanda tangan di lain hari. Kondisi tersebut dikarenakan pekerja tidak bekerja secara maksimal karena rendahnya sikap disiplin dilihat dari tingginya angka kemangkiran pegawai yang datang terlambat sehingga akan menghambat tujuan Organisasi (Mangkunegara, 2015 : 1-12). Dari hasil evaluasi dalam rangka mendisiplinkan ASN maka diterapkan Absensi elektronik yang di harapkan mampu mengubah mental ASN yang suka membolos dan telat masuk kerja dan budaya merangkap absen.

Mesin Absensi elektronik ini di atur jam mulai kerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku hingga berakhirnya waktu kerja, jika ada ASN yang terlambat maka mesin absensi elektronik akan mencatat lama keterlambatan ASN saat masuk kerja. Absen elektronik diharapkan mampu meningkatkan disiplin ASN apalagi masyarakat saat ini yang semakin cerdas dalam menilai sesuatu.Terlebih ASN menyediakan informasi akan di anggap baik, bila sumber daya manusianya yaitu ASN memiliki disiplin tinggi.

Hal ini merupakan wujud professional dalam bekerja dan merupakan sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma – norma peraturan yang berlaku (singomedjo dalam sutrisno, 2015: 86). Sehingga dengan disiplin ASN yang baik akan berdampak pada Peraturan tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pohuwato. Jika ASN Terlambat atau tidak mengisi Absensi online maka TPP nya akan di potong sekian persen.

Kebijakan pada umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun, kebijakan bukan sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Setiap kebijakan publik selalu memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah publik dan mengandung makna sebagai suatu upaya masyarakat untuk mencari pemecahan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan publik juga merupakan pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundangan- undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Atas dasar itu Pemerintah Kabupaten Pohuwato mulai menerapkan kebijakan absensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (SIKAP-ASN) dari berbasis fingerprint ke berbasis android. Penerapan absensi melalui SIKAP-ASN ini mulai diterapakan pada Tanggal 1 November tahun 2021 diseluruh instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Sehingga sekarang atasan pimpinan dapat mengawasi kehadiran para pegawainya karena secara otomatis dapat menampilkan kehadiran semua pegawai secara rinci.

Walaupun sudah diterapkan sejak tahun 2021 sampai sekarang di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato kenyataannya masih ada Aparat Sipil Negara yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Berdasarkan pengamatan penulis yang juga merupakan salah satu aparat Pemerintah di Bagian Subag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pohuwato bahwa sistem ini kurang berdampak pada kinerja aparat Sipil Negara dimana sering terjadi saat selesai melakukan Finger mereka kembali keluar kantor dengan aktifitas lain diluar tugasnya sebagai ASN.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Absensi online tidak menjadi sebuah ukuran dalam kurang maksimalnya penerapan kebijakan absensi melalui SIKAP-ASN di Kabupaten Pohuwato sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Implementasi Kebijakan Absensi Online bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato."

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2014), yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme dengan tujuan meneliti kondisi objek secara alamiah dan apa adanya. Obyek penelitian adalah implementasi kebijakan absensi online bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato, yang dilaksanakan selama dua bulan. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penerapan absensi online. Variabel penelitian dioperasionalkan berdasarkan ciri-ciri kebijakan menurut Ermaya Suradinata (1993), yakni keterkaitan dengan tujuan organisasi, komunikasi yang jelas, adanya batasan dan ukuran tindakan, serta kelayakan pelaksanaan. Informan penelitian terdiri dari 10 orang yang mencakup kepala bagian umum, sub koordinator kepegawaian, pejabat struktural, pegawai pelaksana senior dan muda, pengelola absensi, staf administrasi, pegawai teknis lapangan, serta staf keuangan. Teknik pengumpulan data

meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, dengan sumber data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang mencakup literatur, peraturan, jurnal, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model Miles dan Huberman (2012) yang mencakup empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data melalui penyederhanaan dan pemusatan informasi, penyajian data dalam bentuk informasi terstruktur untuk memudahkan pemahaman dan analisis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola temuan di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan absensi online serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam konteks kedisiplinan ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato.

HASIL PENELITIAN

Untuk mengetahui implementasi kebijakan absensi online pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato, penulis menggunakan teori Ermaya Suradinata (1993) :dengan indicator 1) Memiliki Hubungan dengan tujuan organisas atau lembaga 2) Dikomunikasikan,3) Mengandung ketentuan tentang batas - batasnya dan ukuran bagi tindakan, 4) Masuk akal dan dapat dilaksanakan.

Maka berikut ini penulis sajikan hasil wawancara dengan informan yang hasilnya sebagai berikut :

1. Indikator Memiliki Hubungan dengan tujuan organisasi atau lembaga

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan informan (DP) selaku kepala Bagian Umum Sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato menyatakan bahwa :

"Absen online ini menjadi alat kontrol kedisiplinan yang objektif dimana kebijakan absensi online sudah memudahkan aparat untuk absensi kehadiran karena aparat tidak baku cari dengan absen,ini tinggal buka aplikasi pa dorang pe hp masing-masing pegawai. Ini sesuai dengan kebijakan pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 memenuhi kebutuhan daerah guna pelakanaan pelayanan pemerintah, mewujudkan disiplin kerja di lingkungan pemerintah Pohuwato terutama bagi aparat di bagian Setda Kabupaten Pohuwato ini." "(Wawancara, Desember, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, penulis dapat memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan terhadapan absen online dapat menunjang tujuan organisasi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Pohuwato yang berujuan agar apparat lebih memperhatikan kedisiplinan dalam kerja. Hal ini dapat dilihat dengan keaktifan apparat melakukan absen online melalui aplikasi SIKAP-ASN yang diberlakukan di lingkungan aparat pemerintah Kabupaten daerah Pohuwato.

Hal yang sama pula disampaikan informan (J) selaku Pejabat Struktural Eselon IV yang diwawancarai penulis beliau menyatakan bahwa :

Oh, terkait dengan kebijakan absensi online dengan menggunakan aplikasi SIKAP-ASN yang diberlakukan saat ini menurut saya itu adalah yang hal yang sangat baik dalam rangka mengontrol kehadiran aparat agar lebih disiplin serta obyektif dalam mematuhi aturan kehadiran tepat waktu dalam menjalankan tugasnya sehari – hari, apalagi absensi ini ada dampaknya ke pembayaran TPP bagi aparat yang tidak taan aturan tersebut. hal ini pula merupakan upaya modernisasi manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato, (Wawancara, Desember 2024)

Hasil wawancara dengan informan tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam penerapan absen online melalui aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Aparat (SIKAP-ASN) memberikan dampak terhadap penegakan disiplin dan lebih-lebih pada pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai, yang dinilai berdasaarkan keaktifan dalam melakukan absen sebagai bukti kehadiran aparat sesuai dengan peraturan yang sudah di buat pemerintah daerah kabupaten pohuwato.

Diperoleh informasi dari informan lainnya terkait dengan masalah kebijakan absen online yakni dengan bapak (SH) selaku pegawai pelaksana senior di linkungan setda Pohuwato yang diwawancarai penulis juga memberikan pernyataan bahwa :

"Secara prinsip ini bagus, tapi tidak semua pegawai paham tujuan akhirnya. Harusnya juga diberikan pemahaman soal dampak positifnya bagi karier." (Wawancara, Desember 2024)

Dengan demikian penulis dapat memberikan gambaran dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kebijakan absensi online itu memiliki hubungan erat dengan tujuan organisasi atau lembaga dalam hal ini Sekretariat Daerah Pohuwato yang saat ini telah menerapkan absensi online berupa Sistem Informasi Keahadiran Aparat sipil Negara (SIKAP-ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato dan ini merupakan salah satu wujud dari reformasi birokrasi dalam melakukan modernisasi manajemen kepegawaian yang sebelumnya masih menggunakan absen manual, maka dengan absen online ini pihak yang berwewenang tidak mengalami kendala maupun sudah mudah memperoleh informasi tentang kehadiran pegawai, karena data kehadiran pegawai yang diperlukan sudah real time. Ke tiga informan diatas sangat mendukung penerapan kebijakan absensi online yakni aplikasi SIKAP-ASN karena kebijakan ini sangat berkaitan erat dengan tujuan lembaga pemerintah, terutama dalam meningkatkan disiplin, efisiensi, dan transparansi kehadiran pegawai.

2. Indikator Dikomunikasikan

Dalam peneraparan setiap kebijakan senantiasa dapat dikomunikasikan dengan semua stakeholders yang berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut hal ini dilakukan agar dalam implementasinya nanti kebijakan tersebut tidak mengalami resistensi terutama dari aparat sipil negara yang menjadi sasaran kebijakan penerapan absen Online melaui aplikasi SIKAP-ASN. Komunikasi tersebut dilakukan melalui beberapa bentuk seperti surat edaran, sosialisasi teknis, namun sesuai pengamatan penulis implementasinya belum maksimal karena kebijakan tersebut belum menjangkau secara menyeluruh bagi pegawai di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan (RA) selaku sub koordinator kepegawaian terkait indikator beliau menyatakan bahwa :

Eh.. saya selaku orang yang di tugasi untuk mengkoordinir kepegawaian maka terkait melakukan komunikasi dalam bentuk sosialisasi tentang implementasi absen online tentu itu sudah kami lakukan sebelum penerapan akan kebijakan itu diberlakukan,hal itu penting dilakukan sebab ini terkait dengan penerapan kebijakan yang berkonsekuensi pada sanksi kepada aparat yang akan melakukan pelanggaran karena tidak absen saat masuk kantor, tapi memang ada pegawai yang kurang tanggap terutama dari aparat yang sudah senior atau generasi lama."(Wawancara, Desember 2024)

Pernyataan informan diatas menjadi hal yang perlu di perhatikan oleh aparat terutam aparat di kantor secretariat daerah kabupaten pohuwato. Menjadi urgen diketahu karena akan berdampak pada pengurangan tunjangan tambahan penghasilan pegawai. selaras dengan pernyataan informan diatas, maka pernyataan informan lainnya yakni bapak (RA) selaku Subkoordinator Kepegawaian yang diwawancarai penulis memberikan pernyataan sebagai berikut :

"Kami tahu kapan mulai diterapkan kebijakan absensi online itu, karena dari bidang terkait telah mengkomunikasikan hal itu kepada aparat lebih2 pada aparat di bagian secretariat daerah kabupaten pohuwato. Karena adanya kebijakan ini menjadi suatu warning bagi aparat apabila tidak menaati aturan absen online tersebut. Yanag mana kami akan dikenakan sanksi pelanggaran disiplin yang berimbas pada pemotongan tunjangan TPP sebagaima yang sudah di atur dalam peraturan Bupati tentang disiplin pegawai yang diatur melalui penggunaan absen online yaitu aplikasi SIKAP bagi aparat

negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten pohuwato. Kami juga telah menerima sosialisasi bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut." (wawancara, Desember 2024).

Dari hasil wawancara dengan informan di atas, dapat penulis menggambarkan terkait dengan kebijakan tentang absensi online telah melalui tahapan2 yakni berupa penyebaran informasi kepada aparat sipil di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten Pohuwato sehingga pada indicator dikomunikasikan telah memenuhi aspek yang menjadi bagian yang patut dikomunikasian dengan baik sebagaimana harapan dan tujuan kebijakan di terapkan.

Pernyataan diatas, ini dikuatkan oleh informan lain sebagai pegawai pelaksana muda di kantor secretariat daerah Pohuwato yang berhasil diwawancarai penulis yakni ibu (N) juga memberikan pernyataan bahwa :

"Saya setuju dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam mendisiplinkan aparat sipil yang ada di lingkup pemerintah kabsayupaten pohuwato sebab Kami tahu kapan mulai diterapkan dan cara menggunakannya. Tapi kami tidak diberi tahu data absensi itu nanti digunakan untuk apa saja." (Wawancara, Desember 2024)

Informan lainnya (EL) yakni staf keuangan, yang sempat diwawancarai penulis menuturkan bahwa :

"Informasinya terkait dengan kebijakan penerapan absen online yaitu SIKAP-ASN di kantor secretariat Daerah Kabupaten Pohuwato di dapat dari penyampaian oleh bagian yang sudah ditugaskan yakni bagian IT juga di dapat beredar digroup WhatsApp aparat , tapi tidak semua membacanya. Pegawai teknis yang sering di lapangan kadang terlewat."(Wawancara, Desember 2024)

Dari ketiga informan yang berhasil diwawancarai penulis terkait dengan indicator dikomunikasikan, penulis berkesimpulan bahwa pemberlakuan absen online mereka mengetahui karena informasin disampaikan melalui WhatsApp grup,namun mereka tidak tahu digunakan untuk apa bahkan pegawai yang bertugas dilapanganpun kadang belum mendapatkan informasi yang terapdate karena menerima langsung kabar tersebut.

3. Indikator Mengandung Ketentuan tentang Batas-Batas dan Ukuran bagi Tindakan

Dalam penerapan system absensi online Semua informan mengetahui bahwa sistem absensi online ini memiliki parameter jelas, seperti Jam masuk pukul 07.30, jam pulang 16.00, Toleransi keterlambatan 10 menit, Sanksi administratif jika melebihi batas tanpa alasan, hal ini penulis melakukan penelusuran melalui wawancara dengan informan (MA) selaku pengelola absensi beliau memberikan pernyataan bahwa :

"kalau menurut saya, bahwa pada saat ini sistem sudah otomatis mencatat keterlambatan. Tapi, penindakan masih manual. Kadang ada yang jelas jelas telat tapi tidak diproses."(Wawancara, Desember 2024).

Dari Pernyataan informan diatas, penulis melakukan wawancara dengan informan yang lain, (DS) selaku staf administrasi secretariat daerah kabupaten pohuwato juga memberikan pernyataan bahwa :

Mohon maaf bu' saya ini hanya staf pegawai biasa itu kalau saya lihat "Kalau seperti kami staf pegawai biasa yang telat, langsung ditegur. Tapi anehnya kalau pejabat yang terlambat malah dibiarkan meskipun absen diwakilkan. Ini terjadi saat belum keluar kebijakan pemerintah terhadap penggunaan absen online berupa SIKAP-ASN terutama di kantor kami ini, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi teguran alngsung kepada kami selaku staf di sini..(Wawancara, Desember 2024).

Lain halnya dengan informan berikut ini (RY) selaku pegawai teknisi lapangan yang juga diwawancarai penulis memberikan pernyataan bahwa:

"Maaf ibu, Saya ini sering dinas luar, kadang tidak bisa absen online karena sinyal,dan belum ada SOP jelas untuk kasus seperti saya ini."(wawancara, Desember 2024).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa

tentang sistem absensi online memiliki parameter jelas, seperti yang telah dinyatakan oleh beberapa informan di atas. Namun dari pernyataan informan yang berhasil diwawancarai penulis menilai bahwasanya penegakan aturan tidak konsisten, terutama terhadap pegawai dengan jabatan tertentu, dan ternyata tidak berlaku untuk pegawai - pegawai biasa, Karena terbukti bahwa masih ada pejabat yang sering terlambat tidak diberikan teguran ataupun sanksi, namun kalau pegawai biasa yang telat langsung ditegur ini mengindikasikan bahwa pemberlakuan ketentuan dan batas batas ukuran bagi tindakan belum sesuai bahkan bisa dikatakan ada ketidakadilan.

4. Indikator Masuk Akal dan Dapat Dilaksanakan

Mengenai indicator masuk akal dan dapat dilaksanakan terkait dengan kebijakan absensi online yang diberlakukan di kantor Sekretariat Daerah Pohuwato dapat di telusuri melalui wawancara dengan informan berikut ini :Demikian pula informan lain yang diwawancarai penulis (SH) sebagai Pegawai pelaksana Senior di kantor Sekretariat Daerah Pohuwato memberikan pernyataan bahwa :

"bahwa di kantor sekretariat daerah pohuwato masih ada beberapa rekan kerja saya yang sudah berumur kasiang, mereka itu masih belum terbiasa dengan aplikasi. Perlu pendampingan lebih lanjut, namun karena kebijakan ini memang bagus karena sesuai dengan keperluan kebijakan mendisiplinkan aparat yang sangat masuk akal karena akan kedisiplinan aparat akan berdampak pada hasil kerja menjadi lebih baik."(Wawancara, Desember 2024).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, mereka menyatakan bahwa penerapan kebijakan absen online dengan menggunakan aplikasi SIKAP ini sudah bagus dan masuk akal sebab terjadi dampak positif maupun negate terhadap kebijakan yang diambil pemerintah melalui SIKAP-ASN. namun sedikit saja mengalamai kendala dalam praktekmya ini akibat dari masih terdapat aparat yang bertugas diluar kantor kadang mengalami kendala melakukn absensi secra online dikarenakan jika tempat dimana mereka bertuga lapangan tidak memiliki jaringan yang stabil. Demikian pula dengan pegawai yang sudah sangat senior yang gagap aplikasi teknologi berupa absensi melalui SIKAP-ASN tersebut.

Penulis juga sempat melakukan wawancara dengan informan (RY) selaku teknisi lapangan beliau memberikan pernyataan bahwa :

"Saya bertugas di lapangan, kadang absen terlambat karena sinyal buruk.biasanya juga saya harus ke kantor dulu jam 07.00 melakukan pinjer, baru turun lapangan sebab belum ada fitur offline atau toleransi teknis pinjer diluar kantor dengan jarak yang sudah ditentukan layak pinjer."

Dari informasi yang diperoleh penulis, informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan, menyatakan bahwa sistem absensi online secara teknis masuk akal dan realistis untuk diterapkan, mengingat ketersediaan infrastruktur seperti fingerprint scanner, koneksi internet, dan aplikasi absensi. Namun, tetap ada kendala dalam penerapan kebijakan pinje online akibat masalah teknis, dimana pegawai mengalami kendala ketika menjalankan tugas lapangan sedangkan dilokasi tugas tersebut tidak memndapatkan jaringan internet yang memadai (berupa gangguan jaringan) yang mengakibatkan pegawai tersebut tidak dapat melakukan pinjer online sehingga pegawai harus kekantor terlebih dahulu kemudian berangkat memenuhi tugas luar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permasalahan jaringan internet itu menjadi perhatian khusus bagi pengambil kebijakan untuk senantiasa memperhatikan kekurangan – kekurangan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan absensi online.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan informan penelitian maka penulis memberikan penjelasan dalam pembahasan terhadap indicator - indikator penelitian sebagai berikut.

1. Hubungan dengan Tujuan Organisasi atau Lembaga

Kebijakan absensi online yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pohuwato khususnya di Sekretariat Daerah Pohuwato dipandang sudah sesuai dengan tujuan organisasi, yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai sebagai aparat yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal pelayanan, kehadiran pegawai di tempat tugas tepat waktu sangat membantu pegawai dengan ketentuan waktu kerja terhadap sebagaimana yang diatur melalui Peraturan Pemerintah dalam penerapan absen elektonik (E-absen) melalui Sistem Informasi Kehadiran (SIKAP) yang merukan Aplikasi Pencatatan Absensi (kehadiran).. pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang layanan masing-masing bagian pada secretariat Daerah kabupaten pohuwato. Hal ini pun memberikan dampak terhadap efisiensi, dan transparansi dalam kehadiran pegawai. Pengecekan kehadiran yang sifatnya online berupa pinjer merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatur pegawai dalam rangka disiplin kerja yang tentu pengawasan pemerintah dilakukan secara langsung berdasarkan cek kehadiran secara online kepada pegawai di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato. Kebijakan ponjer online merupakan bagian dari reformasi birokrasi, khususnya modernisasi manajemen kepegawaian. Namun demikian, sebagian pegawai merasa belum memahami dampak langsung dari kebijakan ini terhadap pengembangan karier mereka, yang dirasakan oleh pegawai adalah kebijakan atas pengurangan terhadap Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ini menandakan masih kurangnya internalisasi makna kebijakan secara menyeluruh.

2. Dikomunikasikan

Kebijakan absensi online telah disosialisasikan melalui berbagai saluran seperti surat edaran, maupun WhatsApp grup, dan pertemuan staf. Namun, sosialisasi yang dilakukan belum mencerminkan terkomunikasikan dengan kebijakan terhadap Sistem absensi online secara menyeluruh kepada pegawai, sering juga aparat sipil negara yang mendapat tugas luar yang berada di lapangan mengalami kendala terkait penerapan aplikasi absen online. Seringkali juga dialami oleh generasi senior atau aparat yang hamper purna bakti , menunjukkan kurang memahami sepenuhnya maksud, tujuan, serta penggunaan data dari sistem absensi online. Bahkan ada indikasi bahwa sebagian pegawai hanya mengetahui teknis penggunaannya, tetapi tidak memahami nilai fungsional dan strategis dari sistem ini. Ini menunjukkan adanya celah dalam komunikasi dua arah dan pemahaman yang mendalam.

3. Mengandung Ketentuan tentang Batas-Batas dan Ukuran bagi Tindakan

Sistem absensi online melalui aplikasi SIKAP-ASN memiliki parameter yang jelas dan terstandar, seperti jam masuk dan pulang, toleransi keterlambatan, dan sanksi administratif. Namun dalam implementasinya, terdapat kendala dalam implementasinya atau inkonsistensi. Pegawai struktural atau pejabat sering tidak dikenakan sanksi saat melanggar, sementara pegawai pelaksana langsung diberi teguran. Selain itu, pegawai lapangan mengalami kesulitan melakukan absensi karena keterbatasan sinyal, dan tidak ada SOP khusus yang mengatur hal tersebut. Hal ini menimbulkan kesan diskriminatif dan mengurangi kredibilitas kebijakan terhadap absen online tersebut.

4. Masuk Akal dan Dapat Dilaksanakan

Hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan indicator masuk akal dan

dapat dilaksanakan dengan baik sebab peneraoan kebijakan system absensi yang jenis online memberi memerlukan dukungan sepenuhnya dari aparat sipil negara yang berorienasi pada pengawasan kedisplinan aparat secara teknis, menyeluruh yang menimbulkan akibat pemberian sanksi bagi yang melanggar kebijakan tersebut dan memberi dampak positii bagi aparat yang mematuhi sepenuhnya atas kebijakan peneraparan absensi online melalui pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai menerima secara utuh tunjangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini masuk akal dan bisa diterapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis serta pembahsan sebelumnya serta analisis dengan menggunakan teori kebijakan Ermaya Suradinata (1993), maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Kebijakan absensi online memiliki relevansi kuat dengan tujuan Sekretariat Daerah Pohuwato, yaitu meningkatkan kedisiplinan dan efisiensi pegawai sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
2) Penyampaian informasi kebijakan sudah dilakukan, namun belum menjangkau pemahaman secara menyeluruh, terutama pada pegawai lapangan dan generasi senior.
3) Sistem absensi memiliki aturan yang jelas, namun belum ditegakkan secara adil dan konsisten, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap keadilan dan netralitas kebijakan.
4) Secara teknis kebijakan ini dapat dilaksanakan, tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaan, seperti gangguan sistem, keterbatasan sinyal di lapangan, dan kurangnya kemampuan beberapa pegawai teknis. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini, diperlukan pendalaman sosialisasi, Penegakan aturan yang adil dan merata, Perbaikan sistem teknis dan penyediaan SOP untuk kondisi khusus yang berdampak pada sanksi yang sudah ditentukan dalam peraturan Bupati yang merupakan rujukan terhadap penerapan kebijakan absen online melalui aplikasi SIKAP-ASN. Pelnaggaran terhadap kebijakan ini mengakibatkan pemberian sanksi yang berdampak pada pembayaran tunjang Tambahan Penghasilan pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.

DAFTAR PUSTAKA

A.S Moenir (1983: 111) Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan. Kepegawaian.

Alex S. Nitisemito (1980: 143) Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Dunn. N. William, 2003. Pengantar Analiisi Kebijakan Publik. Terjemahan Wibawa

E Suradinata, , 1993. 39, 1993 MS paradigma baru kepemimpinan pemerintahan dalam politik dan bisnis. Bandung: Mandar Maju.

George C. Edward III(Subarsono,2011: 90-92) Implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel

Guntur (1996: 34-35) sikap disiplin yang perluu di kelolaa dalam Pekerjaan Suharno , (2013 : 4) Dasar – Dasar Kebijakan

Guntur. 1996. Motivasi dalam Organisasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Hasibuan (2005: 89) Manajemen Sumber Daya Manusi , Bumi aksara : Jakarta, Kartini 2006. Pemimpin dan Kepemimpinan

Karyawan, Bogor: FPITB 2004 hal 26Faisal, Hubungan Penerapan E Absensi terhadap Kinerja pegawai , Bogor: FPITB, 2006

Leo Agustino (2014: 149) menanamkan model Implementasi Publik (Direct

and Indirect Impact on Implementation)
Maznania, Daniel A and Paul A. Sabatler.1983 Implementation and Publik Policy,scott Foresman and.Company,USA
Maznania, Daniel A and Paul A. Sabatler.1983 Implementation and Publik Policy,scott Foresman and.Company,USA
Miles dan Hubermen (2012: 225) Analisis Kualitatif
Moenir, AS. 1983. Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian Jakarta. Gunung Agung. Jakarta
Projodarminto (1999: 25) Disiplin terbagi Tiga Aspek
Projodarminto, Soegeng, 1999. Disiplin Kita Menuju Sukses. Bandung: Pradyaparamita.
Rachmad, Gunawan Dadang .(2016). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: pustaka Setia
Samudra, dkk. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Edisi Kedua.
Sugiyono (2014: 244) Metode Analisis Data
Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D.Bandung: Alfebeta
Sugiyono, 2017 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D Bandung, Penerbit Cv Alfabeta
Susanto (1974: 72) Keadaan di suatu Organisasi dibedakan menjadi dua macam
Veithzal Rival (2013 : 823 – 825) Frekuensi Kehadiran pada Peraturan Kerja. Metode Kualitatif
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujun menteri